



Madani 

Notulensi  
Talkshop Seri 1  
#1000Gagasan  
Ekonomi

Kamis, 9 Juli 2020

# Teguh Madani

- Secara momentum kita ingin memanfaatkan momentum new normal untuk mengganti model pembangunan hari ini. Indonesia bukan hanya negara yang rentan terhadap bencana, tetapi juga model pembangunannya membuat kita rentan.
- Model pembangunan ekstraktif membuat kita jenuh dan kita tidak bisa bertahan dengan model seperti ini. Dari 2009, di Asia Tenggara dari kacamata krisis iklim Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap krisis iklim. Apakah pembangunan yang diterapkan hari ini memperhatikan kondisi rentan saat ini? Saya pikir tidak. Contoh, di Papua tetap saja model pembangunan ekstraktif terjadi tanpa melihat potensi kerentanan yang ada.
- Pemerintah juga mengeluarkan peta kerawanan bencana dari aspek kenaikan air permukaan air laut, tetapi pemerintah tetap tidak memperhatikan aspek kerentanan tersebut. Oleh karena itu Madani mencoba menggagas model pembangunan ekonomi yang baru dan memperhatikan aspek keberlanjutan.
- Diatas kertas betapa kerentanan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Kita mengalami kerugian akibat kerentanan sebesar USD 16,1 Milyar. Kalau kita meneruskan model pembangunan ekonomi saat ini tanpa memperhatikan aspek kerentanan maka kerugian ekonomi berpotensi semakin besar.
- Kami mengambil satu fakta penting dari perkebunan sawit karena sawit digadang-gadang menjadi sebagai salah satu penopang ekonomi negara. Kami menemukan setidaknya di Riau kami melihat bencana ekologis yang diakibatkan oleh luasnya perkebunan sawit, ini sesuai dengan tipologi tanaman sawit. Sayangnya ini tidak dijadikan pertimbangan. Kabupaten-kabupaten yang memiliki perkebunan sawit yang luas ini memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis yang besar. Dilihat dari aspek kesejahteraan petani sawit, perkebunan sawit lebih rentan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Tanaman pangan dan hortikultura lebih menguntungkan daripada sawit. Ini bisa menjadi pertimbangan selanjutnya.
- Di sektor pertambangan juga punya permasalahan. Disitu ada kerugian akibat pembuangan limbah saja sebanyak 13 Miliar USD, belum korban jiwa akibat tambang. Bertumpu terhadap pembangunan ekstraktif akan lebih merugikan perekonomian.
- Dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa kita berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Model pembangunan hari ini jelas melanggar konstitusi yang ada. Konstitusi juga mengamankan bahwa sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan fakta model pembangunan hari ini dimana ada ketimpangan yang jelas seperti misalnya yang ada di sektor sawit, maka kondisi ini jelas melanggar konstitusi yang ada.
- Itulah yang menjadi dasar Madani mengumpulkan 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Kita mengajak kepada semua pihak untuk menyumbangkan ide agar pembangunan ekonomi kita dapat lebih sustain. Ketika ide terkumpul maka kita akan menemukan benang merah yang dapat menjadi saran bagi pemerintah.

## Teguh Surya – Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan

- Di sektor pertambangan juga punya permasalahan. Disitu ada kerugian akibat pembuangan limbah saja sebanyak 13 Miliar USD, belum korban jiwa akibat tambang. Bertumpu terhadap pembangunan ekstraktif akan lebih merugikan perekonomian.
- Dalam konstitusi sudah ditegaskan bahwa kita berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Model pembangunan hari ini jelas melanggar konstitusi yang ada. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan fakta model pembangunan hari ini dimana ada ketimpangan yang jelas seperti misalnya yang ada di sektor sawit, maka kondisi ini jelas melanggar konstitusi yang ada.
- Itulah yang menjadi dasar Madani mengumpulkan 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Kita mengajak kepada semua pihak untuk menyumbangkan ide agar pembangunan ekonomi kita dapat lebih sustain. Ketika ide terkumpul maka kita akan menemukan benang merah yang dapat menjadi saran bagi pemerintah.

## Ismid Hadad, MPA – Ketua Dewan Pembina Yayasan Kehati

- Saya akan membahas terkait dari segi mengapa pembangunan ekonomi merusak lingkungan. Mengapanya itu memiliki sejarah yang panjang. Ternyata dari awalnya pembangunan itu hanya diartikan sebagai pembangunan ekonomi, dari sononya sudah diartikan seperti itu. Sejak 61 PBB telah menetapkan dekade pembangunan, semua negara didorong untuk menjadi negara berkembang, pengklasifikasian ini menggunakan indikator kekayaan. Negara dianggap maju tidak hanya berdasarkan satu aspek saja seperti misalnya GDP-nya.
- Ketika kita berbicara pembangunan, orang-orang mengkorelasikannya dengan pembangunan ekonomi. Dekade pertama (60-70) bantuan terhadap negara ketiga marak terjadi dan dianggap sukses memajukan perekonomian negara ketiga. Kesuksesan perekonomian ini ironinya menghasilkan kondisi kesenjangan dan kerusakan lingkungan hidup.
- Lalu mengapa pembangunan hanya fokus ke pembangunan ekonomi saja? Semua negara berkembang ingin bebas dari kemiskinan, sementara pembangunan dianggap sebagai jalan paling cepat untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Pembangunan ekonomi didukung oleh dana dan modal internasional skala besar. Program pemerintah juga didesain untuk menguntungkan sektor swasta dan pasar. Semua pembangunan bersifat jangka pendek, karena itu dia bisa dilihat lebih cepat hasilnya. Pada waktu itu di dunia akademis itu paling banyak literatur yang berkembang yaitu pembangunan ekonomi sehingga narasi yang kuat yaitu pembangunan ekonomi.
- Dalam teori ekonomi termasuk ke dalam hal eksternalitas. Eksternalitas yaitu hal yang diluar cakupan yang diperhitungkan ekonomi. Ini fallacy yang ada dalam teori ini. Dalam teori ekonomi sumber daya alam menjadi salah satu faktor produksi saja atau bahan baku produksi. Oleh karena itu sumber daya alam sah-sah saja untuk dieksploitasi. Lingkungan diperlukan tetapi bukan kebutuhan yang mendesak. Hampir semua kebijakan-kebijakan pemerintah lingkungan itu bukan jadi prioritas utama. Aspek lingkungan tidak dapat dibawa menjadi arus utama policy. Lingkungan dianggap faktor produksi saja bukan sumber penghidupan bagi masyarakat.

## Ismid Hadad, MPA – Ketua Dewan Pembina Yayasan Kehati

- Lingkungan karena dianggap banyak tersedia, maka teori ekonomi saat itu melihat bahwa lingkungan boleh saja dieksploitasi dan dimanfaatkan, tanpa perlu dijaga dan dilindungi
- Ada hal yang penting yaitu konsep ekonomi yang disebut sebagai trade off atau secara harfiah yaitu kita perlu mengganti satu hal apabila kita memilih hal lain, artinya kalau kita membangun ekonomi berarti kita harus merelakan kelestarian lingkungan hidup
- SDGs seharusnya prinsip yang dianut dan diterapkan dalam pembangunan Indonesia. Itu sudah menjadi amanat konstitusi, RPJMN, dsb
- Tantangan untuk melakukan pembangunan tanpa merusak yaitu intinya harus dihindari conflict of interest artinya ada tuntutan untuk menjaga lingkungan lestari. Kalau ekonomi dianggap konstetasi antara ekonomi dan LH, secara sejarah ekonomi akan selalu menang melawan LH. Ya sudah dari situ kita tidak harus melawan, tetapi juga kita harus mengaitkan satu sama lain jadi tidak hanya satu aspek saja. Kalau kita mau bikin kebijakan ekonomi harus disertai perlindungan LH yang kuat. Kebijakan ekstraktif SDA harus dihentikan. Jadi stop itu dan beralih ke hal yang lebih renewable. Bagaimana norma-norma baru diciptakan oleh masyarakat, kita tidak bisa hanya mengharapkan dari pemerintah, maka perlu adanya gotong royong dari para *stakeholders*.

## Rimawan Pradiptyo, Ph.D – Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM

- Memang benar bahwa eksternalitas sering dilupakan. Mohon maaf Pemerintah masih bertahan dengan teori ekonomi tahun 50an. Dalam hal praktis juga pemerintah pemerintah hanya memikirkan satu atau dua tahun saja.
- Ada norma baru yang datang dari Covid. Di game theory itu ada 4 tipe strategi orang mengambil keputusan yang salah satunya yaitu nature. Pandemi menjadi public enemy dan semua negara menjadi autarky. *Evidence Based Policy* menjadi hal yang dapat menanggulangi kelangkaan.
- *Game* yang dimainkan bukan siapa yang dapat menang, tetapi siapa yang bisa bertahan dalam kondisi pandemic ini. Masalah utama Indonesia yaitu tidak tahu sendiri dan tidak tahun lawan kita, karena itu kita bisa kalah. Aspek kelembagaan kita compang camping yang mengakibatkan asymmetric information dan efeknya kepada moral hazard dan larinya semua ke korupsi. Komitmen untuk memberantas korupsi itu lemah karena aspek kelembagaan yang lemah.
- Norma baru yang dimaksud yaitu tata dunia baru kejujuran dan transparansi yang dibutuhkan. Kebiasaan kita mohon maaf sering tidak jujur. Kebutuhan terhadap sains meningkat tetapi statement pemerintah seringkali memperlihatkan sikap anti sains. Norma baru akan mengakui bahwa kita mengalami sense of crisis dan kelangkaan sumber daya.
- Pembangunan ekonomi kita masih berada dalam teori klasik 1950, seharusnya kita perlu masuk ke teori endogenous growth yang salah satunya yaitu memperkuat aspek kelembagaan dan human capital. Ini terjadi antara Malaysia dan Indonesia dimana Malaysia lebih maju dari Indonesia dikarenakan Malaysia sudah menggunakan endogenous growth. Lingkungan juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Pertanyaannya mau atau tidak untuk memperkuat endogenous growth?
- Negara yang memiliki SDA kaya cenderung memiliki aspek kelembagaan yang lemah sehingga kita terjebak dalam natural resource-curse hypothesis. Tidak ada negara maju yang tingkat korupsi yang rendah. BUMS disini tidak diatur, tidak ada aspek kehidupan lain yang tidak diatur oleh negara maju. Korupsi swasta, korupsi staff asing, illicit enrichment, trading of influence itu masuk ke korupsi struktural yang tidak diatur oleh negara. Teori ekonomi selalu berbicara efisiensi dan efektifitas, korupsi akan menggerogoti efisiensi dan efektifitas. Ujung-ujungnya korupsi lagi yang dapat merusak lingkungan.
- Evidence based policy itu permasalahan willingness. Lucunya policy oleh KPK berhasil tetapi KPK secara kelembagaan dilemahkan.

## Diskusi

Dari semua wacana pembangunan hijau, belum ada yang secara bold atau eksplisit menghitung eksternalitas sebagai cost, jadi kita bisa mengkoreksi angka target pertumbuhan ekonomi dan mengkoreksi model pembangunan ekonominya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu *do we need better research?* Lalu apa sih model sains yang bisa mempengaruhi model pembangunan Indonesia?

Rimawan

- Riset saya sebenarnya fokus ke kriminalitas, jujur saya tidak tahu soal eksternalitas ini. Tapi bila ditanya apakah kita perlu menghitung biaya eksternalitas saya pikir perlu ya. Terkait kajian soal eksternalitas, sebenarnya sudah banyak yang meneliti ini, tinggal mozaik-mozaik ini dikumpulkan saja. Tapi permasalahannya *evidence based policy* ini yaitu willingness. Satgas GNSPDA KPK itu sudah terbukti sukses, tapi pertanyaannya kenapa tidak diteruskan?

# Diskusi

Faktor apa yang menyebabkan aspek kelembagaan kita lemah?

Rimawan

- Ada yang mengatakan korupsi sebagai budaya kita, kalau begini dimana-mana orang Indonesia bakalan dikejar-kejar polisi. Diaspora Indonesia dihormati diluar, pertanyaannya kenapa ketika disini perilaku korupsi atau negatif jadi diidentikan dengan budaya kita? Permasalahannya adalah kita tidak mengembangkan sistem untuk membuat masyarakat menjadi patuh. Kenapa sistem kita lemah? Karena dari masyarakat sendiri tidak ada yang menekan. Kenapa masyarakat tidak menekan? Karena masyarakat tidak pernah merasakan krisis sumber daya. Orang luar negeri menilai bahwa kekeliruan dalam mengambil keputusan itu dampaknya sangat panjang dan kemudian mereka sangat kritis terhadap pemerintah

Ismid

- Banyak institusi yang sudah mengeluarkan kebijakan mengenai eksternalitas, tapi pertanyaannya akan diapakan riset tersebut? Governance kita ini yang amburadul, itu yang perlu dibenahi. Governance merupakan ujung tombak untuk menentukan ke arah yang lebih benar. Governance erat sekali dengan sistem politik, munculnya perubahan kita menjadi negara yang lebih demokratis tetapi kita bergeser ke arah oligarki. Governance menjadi tidak jelas karena ada Tarik menarik dari berbagai spektrum politik. Kesulitan utama yang dihadapi sekarang yaitu adanya koalisi yang kuat antara eksekutif dengan legislative, apakah civil society kita bisa bergerak untuk bergeser kesana? Perlu ada social pressure kepada pemerintah



## Diskusi

Kalo kita berbicara pembenahan governance, pemerintah keluar dengan ide RUU Omnibus Law yang bakal menarik lagi kewenangan daerah ke pusat dan semua kebijakan yang berubah atas nama pembangunan. Sekiranya apa yang harus kita lakukan bersama-sama ?

Ismid

- Ada koalisi yang kuat antara eksekutif dengan legislatif, pertanyaannya apakah masyarakat sipil kita bisa bergerak? Saya kira kita semua bergerak ke sana

Rimawan

- Tidak ada sense of crisis yang membuat pembahasan terhadap RUU dilanjutkan. Seharusnya semua negara perlu memfokuskan diri terhadap penanganan covid. Apakah kita perlu merelaksasi? Jelas perlu, tapi perlu relaksasi yang sifatnya resilience.

## Diskusi

Kalo kita berbicara pembenahan governance, pemerintah keluar dengan ide RUU Omnibus Law yang bakal menarik lagi kewenangan daerah ke pusat dan semua kebijakan yang berubah atas nama pembangunan. Sekiranya apa yang harus kita lakukan bersama-sama ?

Ismid

- Ada koalisi yang kuat antara eksekutif dengan legislatif, pertanyaannya apakah masyarakat sipil kita bisa bergerak? Saya kira kita semua bergerak ke sana

Rimawan

- Tidak ada sense of crisis yang membuat pembahasan terhadap RUU dilanjutkan. Seharusnya semua negara perlu memfokuskan diri terhadap penanganan covid. Apakah kita perlu merelaksasi? Jelas perlu, tapi perlu relaksasi yang sifatnya resilience.

# Diskusi

Tadi sempat disinggung juga bahwa pembangunan kelihatannya lebih menarik karena hasil yang didapatkan lebih instan dan mungkin ini yang diingnt oleh teman-teman daerah. Apakah ada solusi untuk tidak terjadi trade-off serta adanya integrasi dari sisi kebijakan

Ismid

- Saya sepakat dengan Pak Rimawan bahwa semua RUU distop untuk dibahas ditengah Pandemi seperti ini. Dalam setiap unsur daripada kegiatan ekonomi harus mengandung unsur-unsur perlindungan sumber daya alam ataupun aspek keadilan sosial. Saya kira tidak ada kompromi untuk merusak lingkungan hidup, saya kira kita tetap memasukkan unsur peluang-peluang ekonomi lain sembari tetap berkomitmen menjaga lingkungan

Emil Salim

- Saya sepakat bahwa Covid dapat merubah pola pembangunan ke depan. Pola pembangunan sebelum Covid harus dirubah total. Pola pemerintah masih meneruskan pola pembangunan yang lama. Pembangunan SDM dapat membantu mengembangkan pengelolaan SDA, namun faktanya pemerintah masih abai terhadap keterbutuhan generasi muda yang terhambat untuk mengakses Pendidikan jarak jauh akibat Covid. Pemerintah malah meneruskan kebijakan pembangunan infrastruktur. Jika bonus demografi ini tidak dapat dimanage dengan baik akibat kita abai terhadap akses Pendidikan jarak jauh yang dialami oleh generasi muda, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk lepas landas pada 2045. Kita masih terjebak dengan paradigma pembangunan lama yang seharusnya kita sudah bergeser ke paradigma pembangunan human capital untuk memanfaatkan bonus demografi. Inti pembangunan SDM memungkinkan adanya value added dari pengelolaan sumber daya alam

Agus Pakpahan

- Covid ini memang keliatannya memerlukan stimulant untuk merubah cara kita berpikir. Dalam kontens pembangunan tanpa merusak lingkungan, ekonom belum melihat aspek kelangkaan sebagai aspek yang diperhatikan, terutama teman-teman akuntan.



Terima kasih